

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Semua aktivitas lembaga baik publik maupun swasta selalu dituntut transparan dan akuntabel. Akuntabilitas dan transparansi sangat penting agar dapat bermanfaat bagi entitas publik lainnya atau pihak-pihak di luar organisasi tersebut dan memaksimalkan perannya pada domain sosial budaya dimana entitas tersebut berada. Salah satu entitas publik adalah organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba merupakan organisasi yang bergerak dalam pelayanan sosial yang dikelola oleh masyarakat dan tidak bertujuan mencari keuntungan. Suatu organisasi nirlaba memperoleh sumber dananya dari penyumbang yang tidak mengharapkan imbalan, menghasilkan barang atau jasa tanpa memupuk laba, dan tidak memiliki kepemilikan.

Terdapat berbagai jenis organisasi di Indonesia, salah satunya adalah organisasi nirlaba atau biasa disebut organisasi non profit. Keberadaan organisasi nirlaba semakin banyak di lingkungan sekitar kita. Sujarweni (2015) menyatakan bahwa organisasi nirlaba merupakan organisasi yang tujuannya tidak semata-mata untuk mencari keuntungan. Dalam PSAK 45 disebutkan bahwa karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis. Perbedaan utama terletak pada cara organisasi memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut. Seperti jenis organisasi lain, pada

organisasi nirlaba juga dituntut untuk dapat menyajikan laporan secara akuntabel dan transparan. Hal tersebut disebabkan karena sebagian besar dana yang diperoleh pada organisasi nirlaba berupa sumbangan dari donatur.

Para donatur tersebut juga berharap dana yang disumbangkan dapat di manfaatkan dan dikelola dengan sebaik-baiknya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi nirlaba dalam hal pengelolaan dana, para donatur biasanya mensyaratkan adanya suatu pelaporan. Hal tersebut sangat penting dikarenakan di masa sekarang ini seringkali kita dengar kasus penyelewangan dana dari donatur pada organisasi nirlaba. Namun dalam perkembangan tersebut masih banyak tantangan, seperti kemungkinan terjadinya korupsi, penipuan, dan skandal manipulasi. Kabar tentang dugaan kasus penyelewangan dana donasi yang dianggap kurang transparan, juga membuat para donatur lebih berhati-hati dan menuntut adanya sebuah laporan yang akuntabel dan transparan. Fitria (2017) menyatakan bahwa Greenlee, etal (2007) menyebutkan tantangan-tantangan tersebut tidak hanya dihadapi oleh organisasi nirlaba, tetapi juga oleh nonprofit dan organisasi pada buruh.

Indonesia merupakan negara yang bebas berpendapat dan demokrasi artinya semua orang berhak mengeluarkan pendapat dan tentu memiliki organisasi – organisasi seperti persatuan maupun serikat yang berkembang dengan baik. Sama halnya organisasi nirlaba yang lain, serikat pekerja juga mendapatkan dana dari para donatur dan dibutuhkan pengelolaan dana yang akuntabel dan transparan. Organisasi nirlaba meliputi organisasi keagamaan, sekolah, rumah sakit, dan klinik publik, organisasi politis, organisasi masyarakat, serikat buruh. Organisasi pada serikat buruh ada pada pimpinan unit kerja atau PUK didalam perusahaan yang ada serikat pekerjaanya. Organisasi SP mengacu pada organisasi dalam sebuah tempat pekerja misalnya Perusahaan.

Banyak anggota yang tidak peduli dengan itu semua, tentang transparansi maupun akuntabel. Karena anggota beranggapan yang penting terdaftar di serikat pekerja dan dengan masuknya mereka menjadi anggota mereka akan lebih aman dan terlindungi selama bekerja di

perusahaan tersebut. Selain berlindung pada undang – undang ketenagakerjaan para buruh tentunya juga bergantung pada serikat pekerja jika nanti terdapat perselisihan buruh dengan perusahaan atau pengusaha. Padahal di luar semua itu mereka juga harus paham tau dan mengerti arus keuangan dari iuran yang setiap bulan mereka bayarkan ke organisasi melalui serikat buruh. Mereka tentunya juga butuh transparansi penggunaan dan pengelolaan dana serikat yang selama ini terkumpul.

Perkembangan ilmu akuntansi di Indonesia saat ini terus meningkat seiring dengan peningkatan kebutuhan manusia yang kompleks dan tuntutan perkembangan zaman. Ilmu akuntansi yang berkembang pada lingkup yang lebih luas tidak hanya mencakup pemerintahan, namun hingga ke organisasi-organisasi masyarakat yang ada pada saat ini, seperti organisasi keagamaan. Dewi (2015) menyatakan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan organisasi merupakan hal yang paling dituntut oleh para stakeholder. Mardiasmo(2009) menyatakan transparansi dan akuntabilitas menjadi kewajiban dan tanggungjawab pemegang amanah untuk mengelola, menyajikan, melaporkan serta menyampaikan segala aktivitas yang dilaksanakan kepada pemberi amanah, dimana pemberi amanah tentunya memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. Secara umum akuntabilitas pada organisasi non-profit hingga saat ini masih di dominasi oleh rasionalisasi hubungan principal-agent (Ebrahim 2003, Van Slyke 2007) yang memperlihatkan bahwa agent sebagai pihak ketiga diberi wewenang oleh principal untuk mengelola organisasi danberpihak kepada kepentingan principal.

Selain akuntabilitas, transparansi juga menjadi tuntutan dalam pengelolaan keuangan pada organisasi nirlaba. Atmaja (2013) menyatakan transparansi sebagai keterbukaan organisasi untuk menyediakan informasi yang relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.

Serikat Pekerja di PT Betts Indonesia adalah suatu organisasi pekerja yang didalamnya terdapat laporan keuangan tetapi laporan keuangan nya masih disusun secara sederhana tidak berdasarkan dengan PSAK no 45 tentang laporan organisasi nirlaba.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti akan melihat penerapan akuntabilitas dan transparansi terhadap laporan keuangan dalam mengelola organisasi nirlaba mulai dari pencatatan sampai pada output yang dihasilkan. Pernyataan Standar Akuntansi No.45 menjelaskan bahwa setiap organisasi nirlaba harus menyajikan laporan keuangannya, sehingga dalam hal ini peneliti ingin melihat apakah organisasi nirlaba yang akan diteliti telah melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan dan meraih kepercayaan anggota organisasi tersebut.

Maka dari itu dari uraian latar belakang di atas penelitian ini berjudul **“Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi terhadap laporan keuangan dalam mengelola organisasi nirlaba”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana laporan keuangan organisasi nirlaba pada organisasi serikat pekerja dapat di terapkan sesuai PSAK No. 45?
2. Bagaimana penerapan transparansi dan akuntabilitas terhadap laporan keuangan dalam mengelola laporan keuangan organisasi nirlaba pada organisasi serikat pekerja?

## **C. Tujuan**

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana transparansi dan akuntabilitas dapat diterapkan dalam mengelola laporan keuangan pada organisasi serikat pekerja.

2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntabilitas dan transparansi terhadap laporan keuangan dapat berjalan dalam mengelola organisasi nirlaba.

#### **D. Manfaat**

Melaksanakan penelitian ini, ada beberapa kegunaan yang hendakdiperoleh antara lain:

##### 1. Aspek Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi siapapun terutama para mahasiswa yang akan meneliti berkaitan dengan akuntansi sektor publik, khususnya para pengurus organisasi dalam pengelolaan keuangan oraganisasi nirlaba,selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan referensi dan acuan bagi akademisi dalam mengkaji persoalan pelaporan keuangan organisasi nirlaba.

Bagi masyarkat, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi terkait penerapan akuntabilitas dan transparansi keuangan dalam mengelolah laporan keuangan organisasi nirlaba sesuai dengan PSAK No. 45 terutama untuk para anggota dalam suatu organisasi nirlaba.

##### 2. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai akuntabilitas dan transparansi dengan baik bagi organisasi atau perusahaan. Dengan penerapan sistem akuntabilitas dan transparansi diharapkan para pengelola keuangan dapat mempertanggungjawabkan setiap laporan keuangan yang disajikan untuk para pengguna laporan keuangan agar tidak salah dalam mengambil keputusan sekaligus menjadi bahan evaluasi terutama pada sektor organisasi nirlaba.